



**PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

LAPORAN AKHIR

**PENYUSUNAN KAJIAN
KONTRIBUSI UMKM TERHADAP
PDRB, TENAGA KERJA DAN
EKSPOR KOTA SURAKARTA**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR

**KEGIATAN:
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**

**SUB KEGIATAN:
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL**

**PEKERJAAN:
BELANJA JASA KONSULTASI
PENYUSUNAN KAJIAN KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB,
TENAGA KERJA DAN EKSPOR KOTA SURAKARTA**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA SURAKARTA**

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen PENYUSUNAN KAJIAN KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB, TENAGA KERJA DAN EKSPOR KOTA SURAKARTA dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Ekspor Kota Surakarta ini mempunyai tujuan antara lain: (1) Menganalisis kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Surakarta; (2) Menganalisis kontribusi UMKM terhadap ketenagakerjaan Kota Surakarta; (3) Menganalisis kontribusi UMKM terhadap ekspor Kota Surakarta; (4) Menyusun rekomendasi kebijakan penguatan kinerja UMKM di Kota Surakarta.

Dengan menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangannya, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyusunan ini.

Surakarta, 16 Agustus 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Manfaat	4
D. Sasaran	5
E. Keluaran	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	6
B. Perkembangan UMKM di Kota Surakarta.....	10
C. UMKM dan Pertumbuhan PDRB	13
D. UMKM dan Masalah Pengangguran	17
E. UMKM dan Peningkatan Nilai Ekspor	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Desain Penelitian	21
B. Populasi dan Sampel	21
C. Variabel dan Pengukuran	21
D. Alat Analisis	22

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	23
A. Kondisi Administrasi Wilayah	23
B. Kondisi Demografis	25
C. Kondisi Perekonomian Daerah	28
D. Potensi Kota Surakarta	37
E. Potensi Dan Pengembangan Wilayah	39
BAB V ANALISIS KONTRIBUSI IKM TERHADAP PDRB, TENAGA KERJA DAN EKSPOR	49
A. Profil UMKM	49
B. Kontribusi UMKM terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	52
C. Kontribusi UMKM terhadap PDRB	52
D. Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ...	55
E. Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Ekspor	58
F. Strategi Peningkatan Kontribusi UMKM Terhadap PDRB, Ketenagakerjaan dan Ekspor	60
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komposisi UMKM Binaan dan Non Binaan	11
Gambar 2.2	Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2016-2020	14
Gambar 4.1	Pembagian Kota Surakarta berdasarkan Kecamatan	24
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2015 Sampai dengan 2020.....	29
Gambar 5.1	Jumlah Tenaga Kerja	49
Gambar 5.2	Jumlah Modal Kerja	50
Gambar 5.3	Jumlah Investasi	50
Gambar 5.4	Jumlah Omset Per Tahun	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM	6
Tabel 2.2	Kriteria UMKM berdasarkan Kriteria BPS	7
Tabel 2.3	Indikator UMKM Berdasarkan UU UMKM dan PP UMKM .	9
Tabel 2.4	Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta	10
Tabel 2.5	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2018-2020	16
Tabel 2.6	Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta	18
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan	18
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	23
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016-2020	25
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020	26
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender 2020	27
Tabel 4.5	PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku	31
Tabel 4.6	Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta (2018-2020: miliar rupiah)	33
Tabel 4.7	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta (miliar rupiah)	34

Tabel 4.8	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Surakarta (miliar rupiah)	35
Tabel 4.9	Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Surakarta (miliar rupiah)	36
Tabel 5.1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	52
Tabel 5.2	Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan tenaga Kerja ...	55
Tabel 5.3	Data Ekspor Berdasarkan Komoditas Tahun 2020	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi program strategis ditinjau dari potensinya yang besar dalam menggulirkan roda ekonomi masyarakat. Disisi lain UMKM menjadi tumpuan bagi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Upaya pemberdayaan UMKM dari tahun ke tahun terus didorong, dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam rangka kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan investasi, penerimaan devisa melalui ekspor komoditi dan atau jasa. UMKM diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja, mengingat sebagian besar UMKM merupakan usaha padat karya, sehingga pertumbuhan UMKM mempunyai dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama didaerah padat penduduk di Indonesia. Umumnya tenaga kerja yang diserap oleh UMKM adalah tenaga kerja yang berpendidikan tingkat menengah bahkan ada juga pada level dasar. Fleksibilitas dari UMKM dalam mensikapi perubahan kondisi ekonomi seringkali memberikan jalan keluar terhadap penurunan kontribusinya dalam memutar roda ekonomi. Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan sector usaha yang dilakukan oleh UMKM. Kinerja usaha UMKM belum begitu menggembirakan karena berbagai hambatan dan kelemahan dalam mengelola bisnis dan kurangnya dukungan permodalan untuk mendukung bisnisnya. Perhatian untuk menumbuh kembangkan usaha Mikro,kecil dan menengah (UMKM) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, UMKM sebagai strategi mempertahankan hidup (*survival strategy*) di

masa kelesuan ekonomi. Alasan kedua, kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alamlokal. Kiprah UMKM dalam menurunkan angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kondisi UMKMdi Kota Surakarta juga memainkan peran penting sebagai mesin inovasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan mobilitas sosial masyarakat. Sektor UMKM secara umum dinilai mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan baik dalam kasus ekonomi maju maupun transisi (Abisuga-Oyekunle dkk., 2020; Amoah dan Amoah, 2018).Hingga saat ini UMKM tetap diandalkan sebagai sektor riil yang menjadi penopang perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 20201, 80 persen angkatan kerja Indonesia bekerja pada lembaga UMKM.

Pekerjaan yang diciptakan dan ditawarkan oleh UMKM terbukti mampu mendukung stabilitas sosial dan memiliki resistensi terhadap dinamika perekonomian yang berdampak pada kelesuan dan krisis ekonomi (Kottika dkk., 2020; Prijadi dan Desiana, 2017). Daya tahan UMKM sangat jelas terlihat saat resesi global melanda dunia seperti yang terjadi pada tahun 2018 (Van Scheers, 2018). Dengan mengandalkan fleksibilitas usaha dan sumber permodalan, maka usaha berskala mikro, kecil dan menengah relatif lebih mampu bertahan dibandingkan usaha dengan skala besar yang banyak dibangun di atas fondasi keuangan yang rapuh. UMKM dinilai memiliki keleluasaan dibandingkan dengan sektor usaha besar untuk mengatasi permintaan yang menurun, pembiayaan yang menjadi langka, dan pembayaran yang tertunda ketika terjadi kelesuan atau bahkan resesi ekonomi. Bahkan pada sebagian UMKM, keleluasaan

sistem usaha dan kemampuan beradaptasi ini dapat menjaga produktivitas dan kemampuan melakukan ekspor ke luar negeri, terutama bagi UMKM yang mampu cepat menyerap pemahaman terhadap teknologi dan digitalisasi (Jung dkk., 2018; Descotes dan Walliser, 2018).

UMKM di Indonesia sebagai salah satu fondasi perekonomian yang kuat masih memiliki beberapa masalah dalam perkembangannya. Masalah yang tergolong klasik dalam perkembangan UMKM sendiri antara lain adalah permodalan, wawasan pengusaha mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, dan perlindungan produk seperti paten dan hak kekayaan intelektual. Fakta mengenai permasalahan ini mendorong ekosistem UMKM yang melibatkan pelaku UMKM itu sendiri, dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan media masa untuk terkoneksi lebih kuat dalam penanganannya. Di Kota Surakarta, fakta ini didukung dengan data bahwa terdapat 43.804 unit UMKM yang terdaftar, dan hanya sebanyak 2.978 yang merupakan UMKM binaan, baik dibina dalam hal teknis produksi, pengelolaan usaha, perizinan dan administrasi, maupun perlindungan terhadap produk (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, 2017).

Sebagai sektor yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan PDRB, serapan tenaga kerja dan pertumbuhan nilai ekspor bagi Kota Surakarta, dukungan penuh perlu terus ditingkatkan bagi UMKM. Program-program seperti ini harus lebih gencar disuarakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dari UMKM, sehingga UMKM dapat lebih kuat dalam menyokong perekonomian daerah. UMKM Kota Surakarta masih membutuhkan kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah

menciptakan permintaan bagi produk yang dihasilkan. Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Ekspor Kota Surakarta ini menganalisis seberapa signifikan sumbangan UMKM terhadap perekonomian Ekonomi sekaligus menawarkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh UMKM di Kota Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Ekspor Kota Surakarta ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Menganalisis kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Surakarta.
2. Menganalisis kontribusi UMKM terhadap ketenagakerjaan Kota Surakarta.
3. Menganalisis kontribusi UMKM terhadap ekspor Kota Surakarta.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan penguatan kinerja UMKM di Kota Surakarta.

C. Manfaat

Pekerjaan Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja, dan Ekspor Kota Surakarta ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Mengukur dampak perkembangan UMKM terhadap PDRB Kota Surakarta.
2. Mengukur dampak perkembangan UMKM terhadap ketenagakerjaan di Kota Surakarta.
3. Mengukur dampak perkembangan UMKM terhadap ekspor Kota Surakarta.
4. Menjadi dasar bagi penentuan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Surakarta.

D. Sasaran

Pekerjaan Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Ekspor Kota Surakarta ini memiliki dua sasaran pokok yaitu:

1. Sebagai dokumen acuan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Ekspor Kota Surakarta.
2. Tersusunnya Kebijakan Pengembangan UMKM Kota Surakarta.

E. Keluaran

Melalui penyusunan Kajian Kontribusi UMKM terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Ekspor Kota Surakarta ini, keluaran yang diharapkan adalah:

1. Dokumen model pengembangan UMKM Kota Surakarta.
2. Dokumen rencana kebijakan pengembangan UMKM Kota Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks.50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Klasifikasi BPS dalam pembagian kriteria UMKM didasarkan pada jumlah tenaga kerja, klasifikasi Industri Jumlah Tenaga Kerja yang termasuk dalam Industri Rumah Tangga adalah dengan jumlah tenaga kerja 1-4 Orang, Industri Kecil antara 5-19 orang, Industri Sedang atau Menengah antara 20-99 Orang dan Industri Besar Lebih dari 100orang.

Tabel 2.2

Kriteria UMKM berdasarkan Kriteria BPS

No	Segmen Klasifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Rumah Tangga	1-4 Orang
2	Industri Kecil	5-19 orang
3	Industri Sedang atau Menengah	20-99 Orang
4	Industri Besar	Lebih dari 100 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih dikenal dengan PP UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 2.3**Indikator UMKM Berdasarkan UU UMKM dan PP UMKM**

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar	<ol style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar

B. Perkembangan UMKM di Kota Surakarta

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor tumpuan bagi Kota Surakarta, tercermin dari pertumbuhan dalam hal jumlah unit usaha. Hingga tahun 2020 tercatat 1.235 unit usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta, serta 164 usaha kreatif dan 6010 usaha non formal yang berpotensi mencakup pelaku usaha level mikro. Keberadaan UMKM Kota Surakarta memiliki jumlah lebih baik dibanding daerah berkarakteristik urban lainnya di wilayah Jawa Tengah (Padwangi, 2019). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 275 usaha menengah, 960 usaha kecil, dan 6174 usaha kreatif dan non formal di mana usaha mikro berpotensi masuk di dalamnya. Jumlah unit usaha meningkat sebesar 0,14% dibanding tahun 2019, dan tingkat pertumbuhan ini masuk dalam kategori baik apabila mengacu pada Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020.

Tabel 2.4
Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta

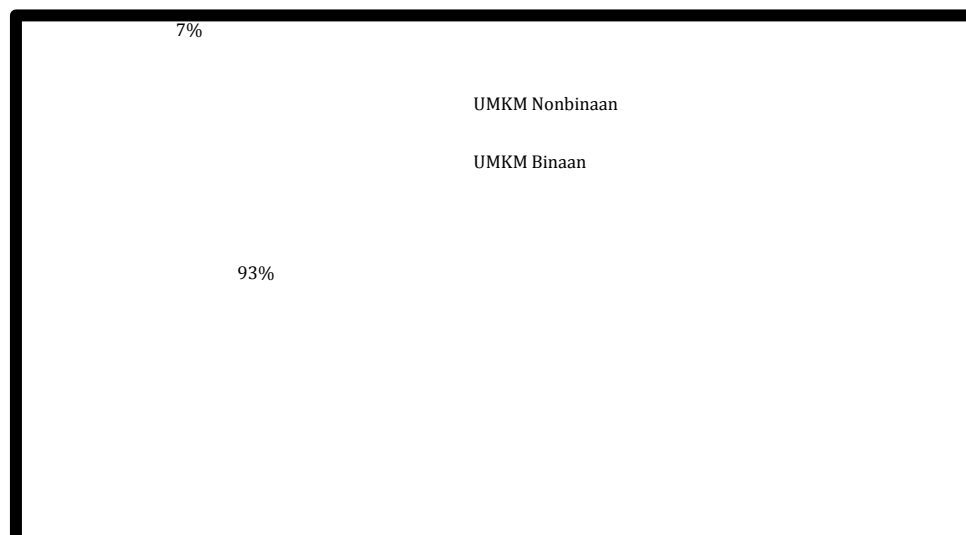
Jenis Industri	Tahun		Pertumbuhan
	2019	2020	
Menengah	271	275	1.48%
Kecil	954	960	0.63%
Kreatif	164	164	0.00%
Non Formal	6010	6010	0.00%
Total Pertumbuhan			0.14%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021

Secara lebih spesifik dalam mengklasifikasikan UMKM berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, terdapat 43.804 unit UMKM per tahun 2017 di Kota Surakarta. Kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro,

2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Meski begitu, dari besarnya jumlah unit UMKM tersebut hanya sebanyak 2.978 unit usaha saja yang sudah menjadi UMKM binaan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian, masih terdapat 40.826 unit usaha potensial untuk dikembangkan melalui program-program pendampingan dan pembinaan. Pembinaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta terus berfokus pada upaya pemasaran produk yang selama ini terkendala karena kebanyakan ritel atau lapak modern memberikan persyaratan berupa ijin produk atau sertifikasi-sertifikasi lainnya. Dengan demikian upaya binaan berupa membuka akses pasar ini berjalan simultan dengan upaya dukungan untuk penerbitan izin usaha dan sertifikasi produk UMKM.

Gambar 2.1
Komposisi UMKM Binaan dan Non-binaan



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, 2018

Sementara itu terkait dengan kelembagaan, berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta, terdapat 667 dari 671 koperasi dan lembaga berbadan hukum dengan status aktif (99,40%) yang mendukung kegiatan UMKM. Tingginya persentase tingkat aktivitas institusi dan koperasi ini mengindikasikan kuatnya keberlanjutan UMKM di Kota Surakarta (Awoyemi & Makanju, 2020). Sementara itu berdasarkan komparasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara bulan April 2019 dan 2020, terdapat pertumbuhan UMKM sebesar 23,85%. Kredit UMKM ini juga meliputi pertumbuhan kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang mencakup modal ventura dan fundraising yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Analisis empiris membuktikan bahwa kredit investasi dan suku bunga melalui peran UMKM dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Muliadi & Kusuma, 2020; Caliskan & Esmer, 2019; Kumar, 2019).

Dalam perkembangan terbaru, meskipun terdampak dan turut dalam kelesuan ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak triwulan ke-2 2020, UMKM Kota Surakarta dianggap masih mampu bertahan daripada mengakhiri usaha. Berdasarkan monitoring dan evaluasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, lebih dari 90% UMKM tetap beroperasi selama serangan pandemi Covid-19, dengan tidak menjadikan PHK dan perumahan terhadap tenagakerjanya sebagai jalan akhir. Pelaku UMKM Kota Surakarta yang tergolong baik dalam hal literasi terhadap teknologi dan informasi (Indeks Daya Saing Daerah 2020), mampu memanfaatkan kegiatan webinar, pelatihan daring, dan *crowdfunding* online yang

berimbang pada bertahannya visibilitas dan pembangunan jejaring usaha.

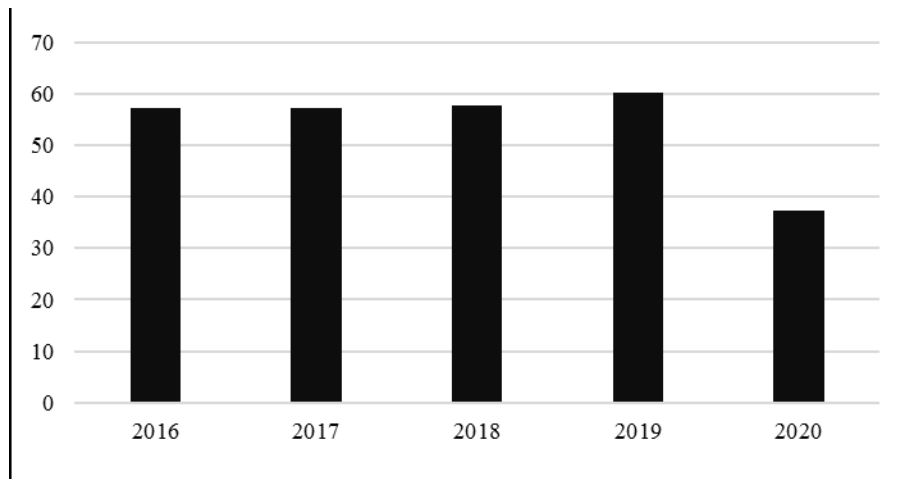
C. UMKM dan Pertumbuhan PDRB

UMKM memainkan peranan krusial dalam memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto dan pembangunan ekonomi hampir di setiap negara (Wozniak dkk., 2019). Terdapat banyak literature tentang UMKM yang dibedakan menjadi dua aliran utama. Pertama, penelitian yang menjelaskan pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam konteks yang lebih luas, sedangkan yang kedua berkonsentrasi pada hubungan yang berlawanan pengaruh lingkungan perusahaan terhadap perkembangan UMKM. Beberapa literatur menemukan bahwa ada hubungan positif antara PDB beserta komponennya dengan perkembangan UMKM, meskipun lebih kuat dalam kasus perusahaan menengah daripada perusahaan mikro dan kecil (Wozniak dkk., 2019; Otrovskaya dkk., 2017; Jenkins dan Hossain, 2017).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM dinilai merupakan salah satu pendorong penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Muliadi & Kusuma, 2020). Secara nasional UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,3% pada tahun 2020, yang merupakan kontribusi terendah dalam kurun lima tahun terakhir (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021). Kontribusi tersebut mengalami penurunan hingga 38,14% dibandingkan dengan tahun 2019, dimana UMKM berkontribusi sebesar 60,3% terhadap PDB. PDB Nasional Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 adalah Rp

15.434,2 triliun, dengan kontribusi dari UMKM sebesar Rp 5.756,9 triliun.

Gambar 2.2
Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021)

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta tahun 2020 adalah Rp 47.644,56 miliar, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan PDRB senilai Rp 48.002,28 miliar. Angka tersebut didominasi oleh sektor Konstruksi dengan sumbangan Rp 12.883,93 miliar, dan paling sedikit di sektor Pertambangan dan Penggalian dengan sumbangan hanya Rp 0,28 miliar. Surakarta menjadi penyumbang PDRB tertinggi ke-2 Kota di bawah Semarang dan berada di urutan ke-5 Kota/ Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

Pertumbuhan UMKM Kota Surakarta didukung oleh infrastruktur yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kondusif, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM baik dalam hal

jumlah unit usaha maupun pertumbuhan pendapatan daerah. Dalam 10 tahun terakhir Kota Surakarta terus mengupayakan pendanaan dan upaya lainnya untuk terciptanya dukungan tempat bisnis, pengembangan inkubator usaha (didukung juga oleh Solo Technopark), pengembangan kawasan industri, dan bantuan pembelian peralatan, yang sebenarnya secara timbal balik akan menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dipantau secara serius.

Sebaran UMKM Kota Surakarta sebagaimana telah didata oleh Dinkop UMKM berdasarkan sektor usaha tahun 2021, paling besar adalah usaha makanan dan minuman (1781 unit usaha) yang terdiri UMKM kuliner sebanyak 1729 unit usaha dan makanan kemasan sebanyak 52 unit usaha. Kemudian disusul oleh UMKM dari industri pengolahan sebanyak 732 meliputi UMKM batik sebanyak 99 unit usaha, fashion sebanyak 165 unit usaha, dan handicraft 468 unit usaha. Selain itu terdapat juga UMKM yang bergerak di sektor usaha jasa (578 unit usaha). Porsi UMKM dalam kontribusi terhadap PDRB dapat tercermin dari data ini. Sektor Industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang memungkinkan dimasuki oleh UMKM kuliner, batik, fashion dan handicraft, dimana masing-masing sektor berkontribusi sebesar 8,45% dan 21,63% terhadap PDRB Surakarta Tahun 2020. UMKM kuliner dan makanan kemasan juga memungkinkan masuk pada kategori sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi 4,58% terhadap PDRB Surakarta. Selain itu, UMKM jasa memungkinkan untuk masuk di sektor Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya yang berkontribusi secara keseluruhan 8,6%. Dengan demikian ada potensi bahwa UMKM di Kota Surakarta memiliki potensi kontribusi

mencapai 43,26% terhadap PDRB Kota Surakarta. Angka tersebut cukup relevan dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia pada tahun 2020.

Tabel 2.5
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2018-2020

Lapangan Usaha		Persentase Kontribusi (%)		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,49	0,49	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,45	8,46	8,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,16
F	Konstruksi	27,14	27,11	27,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,15	22,16	21,63
H	Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,59	1,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,49	5,41	4,58
J	Informasi dan Komunikasi	11,67	12,01	14,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,84	3,76	3,90
L	Real Estate	3,96	3,85	3,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,84	0,86	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	5,54	5,40	5,39

Lapangan Usaha	Persentase Kontribusi (%)			
	2018	2019	2020	
dan Jaminan Sosial Wajib				
P	Jasa Pendidikan	5,46	5,51	5,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,12	1,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,95	0,95	0,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2021)

D. UMKM dan Masalah Pengangguran

Di Kota Surakarta permasalahan mengenai pengangguran merupakan hal yang masih terus diperhatikan, walaupun banyak lapangan pekerjaan yang telah dibuka dan disediakan. Beberapa cara telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk menekan laju berkembangnya tingkat pengangguran di Kota Surakarta, agar masyarakat Kota Surakarta dapat memiliki tingkat produktivitas dan kehidupan yang layak (Sarimuda, 2014). Salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan pengangguran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan pemberdayaan UMKM.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Surakarta terus menunjukkan arah yang signifikan. Dapat dilihat secara umum penyerapan tenaga kerja daerah tidak terlepas dari kontribusi UMKM (Sathish & Rajamohan, 2018). UMKM yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 96%. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah usaha mikro mencapai 58,91 juta, Jumlah usaha kecil sejumlah 59,260 juta, jumlah usaha menengah 4,987 juta. Di Indonesia, total UMKM pada tahun 2018 mampu menyerap sebanyak 64,2 juta.

Sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Industri Kreatif dan Nonformal yang memungkinkan menyerap usaha mikro di Kota Surakarta mampu menyerap sebanyak 33.027 tenaga kerja. Sektor usaha kecil dan menengah menyerap paling banyak tenaga kerja yaitu sebesar 16.422 tenaga kerja pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 288.959 penduduk, dimana 266.082 atau 63,39% dari penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan penduduk yang memiliki pekerjaan.

Tabel 2.6
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta

Skala Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	
	2019	2020
Besar	13.089	13.391
Menengah	7.794	7.85
Kecil	8.545	8.572
Kreatif	164	164
Non Formal	16.441	16.441

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2021)

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Kegiatan Utama	Penyerapan Tenaga Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	160.547	128.412	288.959
Bekerja	148.479	117.603	266.082

Pengangguran Terbuka	12.068	10.809	22.877
Bukan Angkatan Kerja	41.737	89.082	130.819
Sekolah	17.816	21.972	39.788
Mengurus Rumah Tangga	12.848	60.786	73.634
Lainnya	11.073	6.324	17.397
Jumlah	202.284	217.494	419.778

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2021)

UMKM di Kota Surakarta memberikan kontribusi terhadap ketenagakerjaan sebesar 12,41%. Kondisi UMKM di Kota Surakarta ini mencerminkan referensi-referensi terdahulu yang menyatakan bahwa UMKM mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil, yang berdampak peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas inovasi produk, dan mampu memberikan kontribusi penting bagi perusahaan-perusahaan besar, dan sebagai pemasok- pengecer bagi operasi perusahaan besar (Singh, 2021; Jena et al., 2018).

E. UMKM dan Peningkatan Nilai Ekspor

Kegiatan ekspor dinilai sebagai aktivitas penting untuk perkembangan ekonomi suatu daerah (Imran dkk., 2017). Kegiatan ekspor kemudian menghasilkan kinerja ekspor yang mencakup efektivitas ekspor, efisiensi ekspor dan keterlibatan ekspor berkelanjutan. Terkait dengan kinerja ekspor UMKM, terdapat berbagai penelitian yang menemukan bahwa UMKM baru-baru ini mampu masuk dalam tekanan persaingan tinggi yang mengedepankan pasar yang lebih canggih dan pergeseran preferensi pelanggan (Stouraitis dkk., 2017; Gupta dan Barua., 2018). Kemampuan UMKM dalam mengejar kecanggihan dan preferensi pelanggan ini berdampak pada kontribusi UMKM terhadap nilai

ekspor suatu negara atau daerah (Stouraitis dkk., 2017; Raziq dkk., 2017).

Beberapa literatur terdahulu mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara produktivitas tenaga kerja dan kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah terhadap perilaku ekspor (Falk dan Lemos, 2019). Ide ini sejalan dengan kondisi lapangan yang terjadi di Kota Surakarta, dimana jenis industri yang menuntut inovasi terhadap produknya memberikan sumbangan yang besar terhadap nilai ekspor daerah. Beberapa industri populer yang menuntut adanya inovasi dan pengembangan produk di Kota Surakarta antara lain adalah kerajinan batik, mebel, dan tekstil. Industri batik dan mebel adalah dua jenis industri yang paling berpotensi dihuni oleh usaha-usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (Solahuddin dan Wahyuddin, 2018). Selain itu terdapat pula industri yang memberi kontribusi cukup baik bagi nilai ekspor Surakarta yaitu kantong plastik, produk olahan, cerutu (rokok) dan makanan.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Surakarta, realisasi nilai ekspor Kota Surakarta mengalami fluktuasi dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 realisasi nilai ekspor Kota Surakarta mencapai US\$ 30.525.737,37 dan mengalami peningkatan menjadi US\$ 44.126.958,17 pada tahun 2018. Angka tersebut mengalami penurunan meski tidak signifikan, yaitu menjadi US\$ 43.375.330,43 pada tahun 2019. Tantangan realisasi nilai ekspor ini akan semakin diuji dengan perubahan ekonomi secara global akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir triwulan I tahun 2020.

BAB III

METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode survey terhadap UMKM di beberapa bidang usaha di Kota Surakarta. Penelitian ini mengembangkan model pengembangan UMKM Kota Surakarta dengan pendekatan eksplanatory yaitu menggunakan rerangka konseptual yang sudah ada dan mengacu pada model yang dikembangkan Awoyemi dan Makanju (2020).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah UMKM di Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah jenis usaha kecil di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang digabungkan dengan *stratified random sampling*. *Purposive sampling* dipergunakan mengacu pada karakter UMKM berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 yaitu mempunyai badan hukum dan umur usaha lebih dari 5 tahun. *Stratified random sampling* berdasarkan jumlah kecamatan di Kota Surakarta yaitu lima kecamatan, kecamatan Banjarsari, kecamatan Laweyan, kecamatan Pasar Kliwon, kecamatan Serengan dan kecamatan Jebres.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Kapasitas produksi yang diukur dengan kemampuan produksi atau penjualan setiap UMKM;
2. Omset perusahaan yang diukur dengan jumlah penjualan bulanan UMKM;

3. Tenaga kerja yang diukur dari jumlah karyawan keluarga maupun nonkeluarga dalam UMKM;
4. Biaya produksi yang diukur dari biaya yang dikeluarkan perusahaan baik biaya bahan baku maupun biaya pendukung;
5. Modal usaha yang diukur dari aktiva tetap yang dimiliki UMKM;
6. Modal kerja yang diukur dari modal yang dibutuhkan untuk setiap perputaran produksi;
7. Tingkat keuntungan yang diukur dari jumlah penjualan dikurangi dengan biaya-biaya;
8. Jenis barang yang diproduksi atau dijual;
9. Kepemilikan dan penguasaan teknologi;
10. Metode pemasaran produk.

D. Alat Analisis

Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Statistik deskriptif untuk menjelaskan data-data UMKM, untuk menganalisis kontribusi UMKM terhadap PDRB, tenaga kerja, dan ekspor.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. KONDISI ADMINISTRASI WILAYAH

Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" – 110°45'35 Bujur Timur dan 7°36'00" – 7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo.

Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain dalam ruang lingkup Solo Raya, diantaranya adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.

Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo.

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

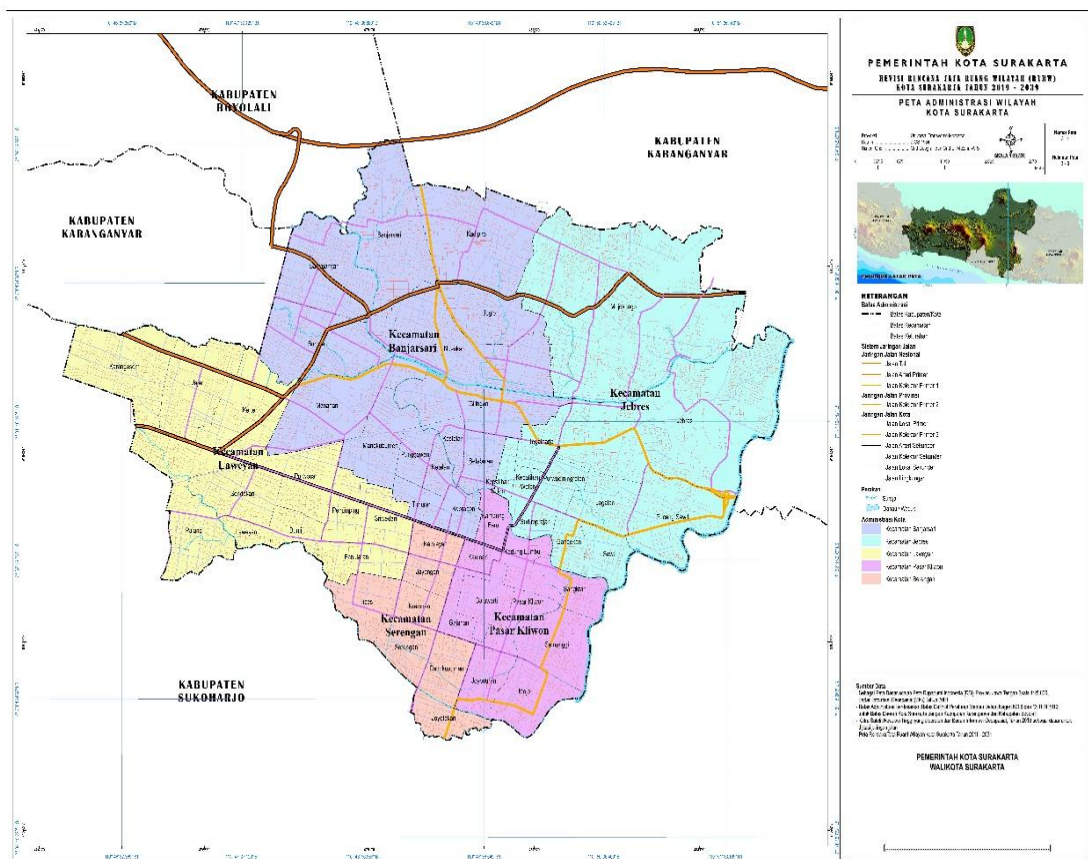
Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	RW	RT
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,810	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12. 2Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan ,SK Walikota No .149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/ 31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta



Gambar 4.1
Pembagian Kota Surakarta berdasarkan Kecamatan

B. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	514.171	516.102	517.887	575.230	522.364
	Laki-laki	249.978	250.896	251.772	283.295	257.043
	Perempuan	264.193	265.206	266.115	291.935	265.321
2.	Laju Pertumbuhan	0,380	0,376	0,346	0,97	0,44

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
	%					
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,95	0,97	0,969
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.674,93	11.718,78	11.759,31	13.061,53	11.861,13

umberS: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka2021.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.524	10.245,83
2	Serengan	47.778	14.977,43
3	Pasar Kliwon	78.517	16.289,83
4	Jebres	138.775	11.031,40
5	Banjarsari	168.770	11.395,68
Surakarta		522.364	11 861,13

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka2021

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun
2020

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.758	17.107	34.865
2	5-9	18.280	17.884	36.164
3	10-14	20.187	19.149	39.336
4	15-19	21.200	20.516	41.716
5	20-24	20.638	20.444	41.082
6	25-29	19.983	19.590	39.573
7	30-34	19.246	18.803	38.049
8	35-39	19.913	19.865	39.778
9	40-44	20.038	20.383	40.421
10	45-49	18.297	18.958	37.255
11	50-54	16.818	18.118	34.936
12	55-59	14.282	16.189	30.471
13	60-64	11.909	13.749	25.658
14	65-69	9.065	10.993	20.058
15	70-74	5.015	6.176	11.191

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
16	≤75	4.414	7.397	11.811
Jumlah		257.043	265.321	522.364

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021

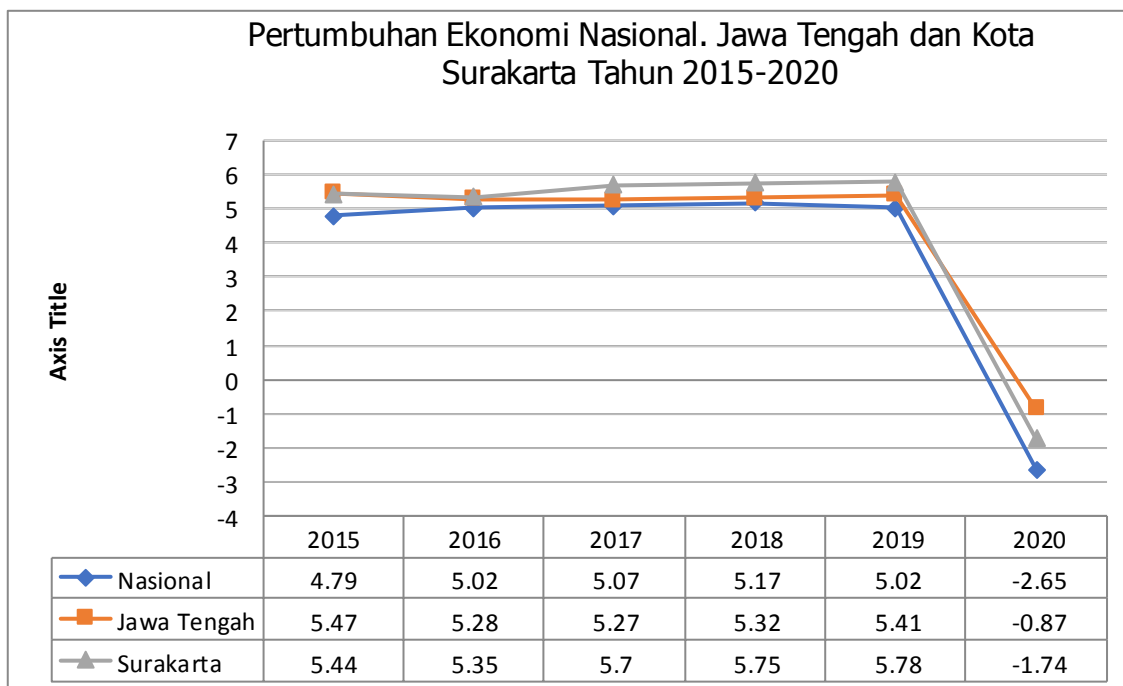
C. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Kondisi ekonomi daerah dan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari nilai dan sebaran PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat fluktuasi, meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2015 Sampai dengan 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pada periode tahun 2017 sampai dengan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta diatas Jawa Tengah, sedangkan tahun 2021 dikarenak pandemic covid 19, pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah mengalami penurunan, terlihat Surakarta mengalami penurunan 1,74% lebih turun daripada Jawa tengah yang hanya turun sebesar 0,87%.

Pada tahun 2020 sektor primer di Kota Surakarta terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalan memberikan sumbangan total mencapai Rp. 234,24 milyar. Sektor sekunder dengan sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi memberikan kontribusi total sebesar Rp.17.234,76 miliar. Pada tahun 2015–2019 sektor tersier memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surakarta sangat fluktuatif. PDRB sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor tersier mendominasi struktur ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2019. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan mencapai Rp.24.303,91 miliar.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun 3 tahun terakhir.

Tabel 4.5
PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku

Kategori		PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219,281.71	233,444.75	243,528.14	6.46%	4.32%
B.	Pertambangan dan Penggalian	308.35	289.08	281.60	-6.25%	-2.59%
C.	Industri Pengolahan	3,755,541.63	4,060,045.30	4,024,918.64	8.11%	-0.87%
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	89,447.76	94,467.61	95,484.59	5.61%	1.08%
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,543.46	68,562.82	74,921.49	6.23%	9.27%
F.	Konstruksi	12,059,892.39	13,011,418.38	12,883,929.92	7.89%	-0.98%
G.	Perdagangan Besar, & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	9,840,818.19	10,635,516.54	10,306,413.83	8.08%	-3.09%
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,133,736.50	1,241,375.56	488,770.97	9.49%	- 60.63%
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,438,524.86	2,596,798.29	2,179,997.16	6.49%	- 16.05%
J.	Informasi dan Komunikasi	5,182,973.52	5,764,427.29	6,929,679.08	11.22%	20.21%
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,704,370.50	1,805,302.07	1,856,884.85	5.92%	2.86%
L.	Real Estate	1,760,865.00	1,846,239.69	1,890,733.35	4.85%	2.41%

Kategori		PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2019	2020
M, N.	Jasa Perusahaan	372,415.59	414,236.87	387,892.84	11.23%	-6.36%
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,459,805.65	2,594,387.03	2,567,427.62	5.47%	-1.04%
P.	Jasa Pendidikan	2,425,953.87	2,643,711.13	2,688,467.54	8.98%	1.69%
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499,078.89	535,372.96	622,766.87	7.27%	16.32%
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	422,259.08	456,680.62	402,465.17	8.15%	- 11.87%
PDRB		44,429,816.95	48,002,275.99	47,644,563.66	8.04%	- 0.75%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

PDRB Kota Surakarta tahun 2020 adalah Rp 47.644.563.660.000, mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan dengan PDRB tahun 2019 yang mencapai Rp 48.002.275.990.000. Sektor konstruksi merupakan penyumbang PDRB tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi sebesar 27% pada tahun 2020. Angka tersebut diikuti oleh sumbangan dari sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 21,63% terhadap PDRB Kota Surakarta. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak populer di Kota Surakarta karena hanya menyumbang kurang dari 0,01% terhadap PDRB Kota Surakarta, dan angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020.

Secara rinci, proporsi penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB Kota Surakarta terbagi ke dalam Rumah Tangga, Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT), dan Pemerintah. Pada tahun 2020 penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB terbesar adalah dari Rumah Tangga, yaitu sebesar Rp 24.540,85 miliar. Pada tahun 2020 proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi adalah sebesar 61,70%.

Tabel 4.6
Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta
(2018-2020; miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
a. Rumah Tangga	22,587.79	24,210.99	24,540.85
b. LNPRRT	278.35	312.57	291.07

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
c. Pemerintah	4,873.87	5,090.82	4,566.20
Jumlah	27,740.01	29,614.38	29,398.12
PDRB ADHB	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Proporsi Konsumsi	62.44%	61.69%	61.70%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (BPS Kota Surakarta)

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik (Kota Surakarta), tetapi diperdagangkan ke luar Kota Surakarta. Untuk menghasilkan produk yang diekspor dihitung menggunakan kapital, atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang-barang kapital.

Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB). Rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta termuat dalam Tabel 2.3.

Tabel 4.7

Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta (miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Nilai Ekspor (ADHB)	17,100.64	18,444.11	15,662.37
Total Nilai PMTB (ADHB)	31,167.73	33,871.41	30,617.43
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0.55%	0.54%	0.51%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (BPS Kota Surakarta)

Dari Tabel 4.7 didapatkan total nilai ekspor Kota Surakarta lebih kecil dibanding nilai PMTB, sehingga rasionya kurang dari 1. Rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB selama 3 (lima) tahun terakhir sebesar 0,53. Nilai rasio ini terus menurun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, karena perkembangan nilai ekspor yang berbeda dengan perkembangan nilai PMTB.

Rasio Perbandingan PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data rasio tersebut dapat menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar Kota Surakarta. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata rasio PDRB terhadap impor Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 1,49. Peningkatan rasio dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan semakin menurunnya kebutuhan masyarakat Kota Surakarta terhadap impor.

Tabel 4.8
Rasio PDRB terhadap Impor Kota Surakarta (miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Impor (ADHB)	31,893.70	34,219.65	28,333.41
PDRB (ADHB)	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1.39%	1.40%	1.68%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (BPS Kota Surakarta)

Tingkat ketergantungan (ketidakseimbangan) ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (supply) dengan total permintaan akhir (demand). Sisi keseimbangan penyediaan (supply) dan permintaan akhir (demand) tersaji dalam Tabel 2.5.

Tabel 4.9
Keseimbangan Penyediaan & Permintaan Kota Surakarta (miliar Rupiah)

Uraian Konsumsi Akhir (ADHB)	2018	2019	2020
Total Penyediaan PDRB (ADHB)	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Persentase Penyediaan PDRB	58.21%	58.38%	62.71%
Total Nilai Impor ADHB	31,893.70	34,219.65	28,333.41
Persentase Nilai Impor ADHB	41.79%	41.62%	37.29%
Total Permintaan Akhir	76,323.52	82,221.93	75,977.97
Persentase Permintaan Akhir	100%	100%	100%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dicerminkan bahwa pada periode Tahun 2018 – 2020 Kota Surakarta masih bergantung terhadap produk dari luar wilayah Kota Surakarta sebesar 37,29 - 41,79 persen untuk memenuhi permintaan akhir domestiknya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 58,21 - 62,71 persen dari hasil produksi domestik.

Sementara itu nilai penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik sebesar 44,42 triliun

rupiah pada Tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 48,00 triliun rupiah pada Tahun 2019 kemudian turun menjadi senilai 47,64 triliun rupiah pada Tahun 2020. Sehingga nilai dari berbagai produk barang dan jasa yang diimpor merupakan nilai dari kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang tidak dapat dicukupi oleh hasil produksi domestik pada tahun yang bersangkutan.

D. POTENSI KOTA SURAKARTA

Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Secara umum sektor unggulan yang ada di Kota Surakarta, dengan masing-masing clusternya per kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Laweyan, sektor unggulannya berupa batik, tekstil, garmen, mebel, kaca ukir, sangkar burung dan shuttlecock dengan jasa pendukung adalah pendidikan, biro travel, tempat wisata, kesenian daerah dan perhotelan.
2. Kecamatan Serengan, sektor unggulannya berupa industri makanan dan minuman, pakaian tradisional, batik dan tekstil serta aksesoris antik dengan jasa pendukungnya adalah berupa rumah penginapan dan kerajinan pembuatan letter.

3. Kecamatan Pasar Kliwon, sektor unggulannya berupa kerajinan dan batik kayu, pakaian (sandal dan sepatu), makanan dan minuman dengan jasa pendukung berupa travel biro, kesenian tradisional dan jasa sablon.
4. Kecamatan Jebres, sektor unggulannya berupa meubel, batik tekstil dan garmen, produk hiasan berupa mosaik bulu ayam. Dan jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, internet dan gedung olah raga.
5. Kecamatan Banjarsari, sektor unggulannya berupa minuman tradisional (jamu, meubel, sangkar burung, batik tekstil serta makanan dan minuman. Dan jasa pendukungnya adalah berupa travel biro dan penginapan/hotel.

Di Sektor perdagangan, hotel dan restoran Kota Surakarta sudah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Letak geografisnya sebagai kota transit yang dilalui lalu lintas Jakarta-Surabaya sangat berpengaruh dalam perkembangan perdagangan. Produk yang diperdagangkan erat kaitannya dengan sektor industri dan pertanian. Perdagangan yang berorientasi ekspor dilakukan oleh perusahaan dengan skala produksi yang besar. Produk yang diperdagangkan antara lain produk tekstil dan hasil kerajinan. Sedangkan perkembangan sub sektor hotel dan restoran merupakan faktor pendukung bagi perkembangan sektor perdagangan dan wisata. Banyak orang yang datang ke kota Surakarta dengan maksud keperluan bisnis ataupun hanya sekedar berlibur, sehingga fungsi hotel dan restoran sangat mendukung dan diharapkan para pengunjung.

Sektor industri diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah kota Surakarta yang memegang peranan

penting bagi pertumbuhan perekonomian, dikarenakan sifat industri itu sendiri bertujuan menciptakan nilai tambah hasil produksi sektor lain sehingga memiliki nilai akhir yang lebih tinggi. Perkembangan sektor industri di Kota Surakarta, dimasa yang akan datang dititikberatkan pada industri rumah tangga dan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2001 jumlah industri kecil di Surakarta mencapai 3.821 industri, sedang industri besar dan menengah ada 56 industri dengan tenaga kerja yang terserap berjumlah 38.765 orang. Dari beberapa jenis industri yang ada di kota Surakarta terdapat produk unggulan yaitu; usaha konveksi, yang terdiri dari usaha pembatikan dan pakaian jadi.

E. POTENSI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlidungan setempat, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai kurang lebih seluas 105 ha. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hulu, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, Kali Tanggul dan sungai-sungai yang lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha. Kecamatan Laweyan seluas 7 ha, Kecamatan Pasar Kliwon seluas 4 ha dan Kecamatan Serengan seluas 6 ha.

b. Kawasan Cagar Budaya

1) Kecamatan Banjarsari, meliputi RRI Surakarta, Ponten, Kantor Kelurahan Keprabon (Bekas Ndalem Rekso Hadiprojo), Puro Mangkunegaran, Polsek Banjarsari, Puro Mangkunegaran Timuran, Monumen Pers Nasional, SLTP. Negeri 10, SMPN 3 Surakarta, PTPN IX Surakarta, Masjid Al-Wustho, Monumen 45, SLTP. Negeri 4, Stasiun KA Balapan, Stasiun KA Balapan, GKJ Margoyudan, SMU. Negeri 1 dan SMU. Negeri 2, Stasiun KA Balapan, Taman Balekambang, SLTP. Negeri 1, Rumah Kuno (The Acacia), Ndalem Padmosusastran, TK Taman Putera, Pesarean Nayu/Astana Utara, Monumen Geriliya Mas TP, Eks CPM

Belanda, Rumah Dr. Oen, Ndalem Kanjengan, Panti Pamardi Yoga, Monumen Pasar Nongko, SMPN 5 Surakarta, Gardu Listrik Ngarsopuro dan Monumen Guru PGRI.

- 2) Kecamatan Jebres, meliputi Pasar Gede Solo, SD Warga, Dinas Pertanian Kota Surakarta, Tugu Adipura, Solo Jebres, SMP Negeri 13, SMK Kristen Margoyudan, Taman Satwa Turu Jurug, Taman Tengah Tugu Cambengan, Makam Putri Cempo, Pagoda Jebres, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Gapura Batas Kota Jurug, SD Tripusaka, Gapuro Keraton (Dr.Oen), Hotel Trio, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Tugu Jam Pasar Gede, Eks Kantor DPU, Klentheng Tien Kok Sie dan Jembatan Jurug Lama.
- 3) Kecamatan Laweyan, meliputi Masjid Museum Keraton, MTSN 2 Surakarta, Kelurahan Laweyan, Makam Djangrono II, Masjid Tegalsari, Roemahkoe Heritage, Taman Sriwedari, Museum Radyapustaka, SMP 15 Surakarta, Pengadilan Negeri, Eks RSJ Mangunjayan, Balai Soedjatmoko, Dalem Wuryoningratan, Gereja Paroki Santo Petrus Gendengan, SMK Murni 2 dan SMK Murni 1, Lodji Gandrung, Taman Seputaran Tugu Lilin (Rumah Priyomartanan), Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV-33/ Karanganya, Satlantas Surakarta, RS Slamet Riyadi, Stasiun KA Purwosari, Lokananta, Gapura Batas Kota Kleco, Bekas Kantor Veteran, Makam R. Supomo, Ndalem Doyoatmojo, Monumen Stadion Sriwedari, Rumah Praktik Dr.Tunjung, Patung Ronggowarsito, Monumen Sondakan, Rumah KH. Samanhudi, Rumah Bp.Uswidarto, Rumah Ibu Supardi, Rumah Bp.Arif Rusdi, Rumah Bp.Sriyadi, Langgar Laweyan, Langgar Merdeka, Bekas Bandar Kabanaran,

Rumah Bp.Ahmad Alkatiri, Rumah Bp.Soeseno, Rumah Bp/Soebandono, Puri Baron, Makam Ki Ageng Henis, Monumen Panularan, Bekas RS. Kadipolo, Monumen Pejuang TP.

- 4) Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi Ndalem Hadiwijayan, Kantor CPM Surakarta, Masjid Riyadh, Kraton surakarta, SD Carangan (Rumah Eks Lumbu), Ndalem Wiryodiningratan, Primkopad D-12 Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop), Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Mloyokusuman, Ndalem Joyokusuman, Stasiun Solo Kota, Masjid Agung Surakarta, GKJ Loji Wetan, Benteng Vastenburg, SMPN 11 Surakarta, Kawasan Loji Wetan, Tugu Pamandengan Dalem, GPIIP Penabur Solo, Sekertariat Daerah (Bunker Balaikota Surakarta), SD Pangudiluhur, Sekolah Marsudirini, Tugu Pamandengan Dalem, Museum Bank Indonesia, Ndalem Mloyokusuman, Polsek Pasar Kliwon (Kantor Bondho Lumakso), Eks Kantor Brigif 6, Makam Kyai Batag (Raden Pabelan), Gapuro Keraton (Pamurakan), Gapuro Keraton (Mojo), Gapura Keraton – Gading, Bruderan Purbayan, Susteran Purbayan St. Fransiskus, Rumah Sentosayan (Susuno Projo Sasano), Rumah Koesoma Kesawan, Rumah Atmo Suparman, Langgar Trayeman, Kawasan Kauman, Mambaul Ulum, Gapura Keraton – Klewer, Ndalem Sindusen, Makam Kiai Solo, Ndalem Prajapangrasan, Pura Persembahyangan SA. Dhar. Ma. Pan Mandiri Seta, Masjid Ar Raudah, Masjid Jami Assegaf, Ndalem Suryakusuman, Ndalem Suryaningratan, Rumah Juru Martenan, Ndalem Natanegaran, Rumah Laksmintan, Rumah Soetamandalan, Ndalem Suryapuran, Rumah

Tirtadiningratan, Ndalem Bonokamsi, Rumah Sekullanggen, Rumah Kota Waringin, Rumah Cokrowinatan, Rumah Wirengan (Kusumodigalan), Wongso Sudirjan, Ndalem Prabuningratan, Ndalem Mangkubumen, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan, Ndalem Ngabean, Sekolah Pamardi Putri, Rumah Prabuwinoto, Kraton Surakarta, SMP Kasatryan Surakarta, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan dan Taman Patung Slamet Riyadi.

- 5) Kecamatan Serengan, meliputi Wisma Batari, Gereja Joyodiningratan, Ndalem Padmonegaran, Ndalem Cokrosuman dan TITD Poo An Kiong.

c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 446 ha atau sekitar 9,5% dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 486 ha atau sekitar 10,4% dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 261 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

2. Kawasan Budaya

a. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 6 ha di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo.

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 100 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 43 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra UMKM (Industri Kecil dan Menengah) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan dan Istana Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dikembangkan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya dan sungai. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bengawan Solo.

d. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan sektor informal, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.376 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 674 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.

- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.163 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 127 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
- 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 331 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 248 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan sebagaimana dengan luas kurang lebih 54 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.

e. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 67 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang

lebih 23 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 25 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 6 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 9 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 4.

f. Kawasan Sektor Informal

Kawasan sektor informal meliputi ruang tempat penyelenggaraan acara pemerintah daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (night market) di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto dan lokasi lainnya berdasarkan kajian; ruang tempat penyelenggaraan acara kawasan bebas kendaraan bermotor (Car Free Day); ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR); dan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh pemerintah daerah.

g. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.

h. Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 16 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 12 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

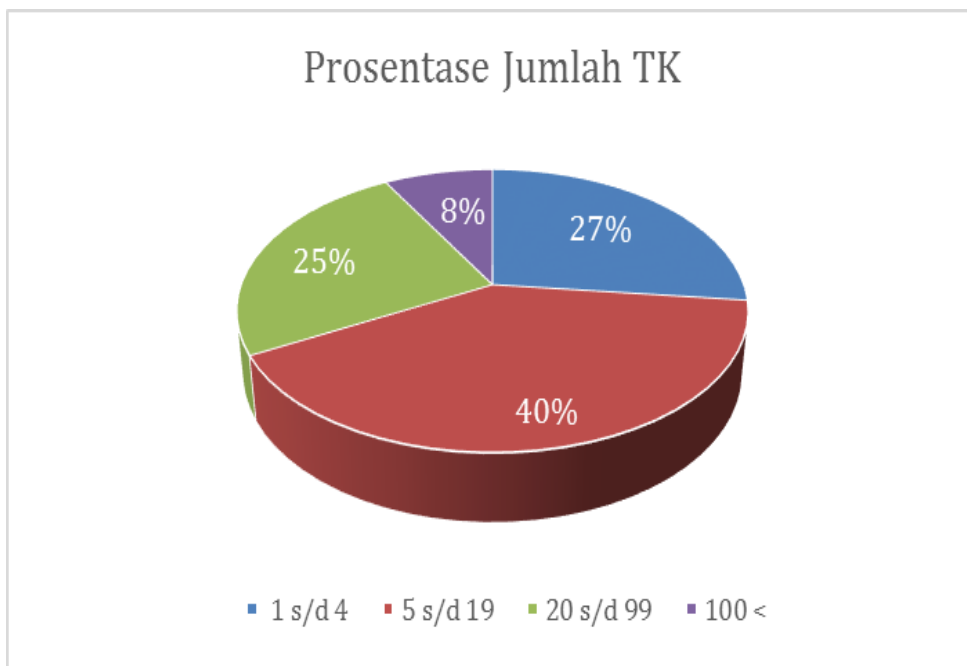
- 1) Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/ Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon; dan
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon.

BAB V
ANALISIS KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB, TENAGA KERJA
DAN EKSPOR

A. Profil UMKM

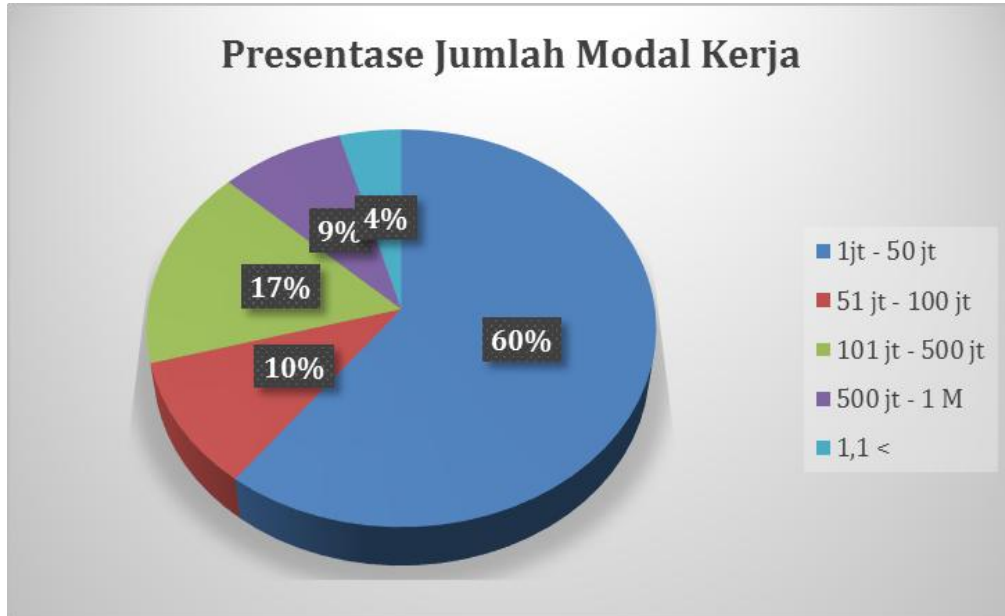
1. Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Total

Gambar 5.1
Jumlah Tenaga Kerja



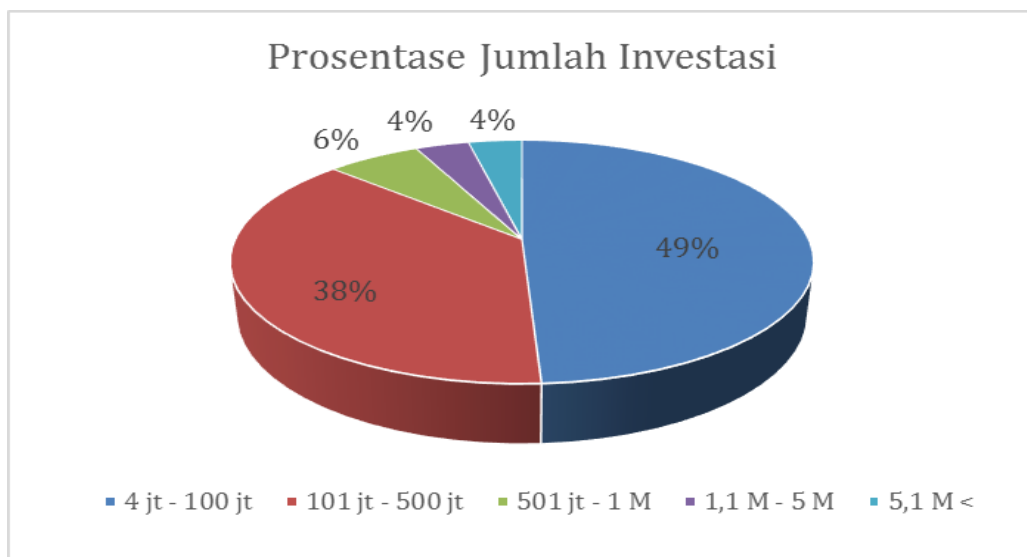
UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu antara 5 – 19 Orang, kemudian 1 – 4 orang sebanyak 27% dan antara 20 – 99 orang sebanyak 25% dan lebih dari 100 orang sebanyak 8%.

Gambar 5.2
Jumlah Modal Kerja



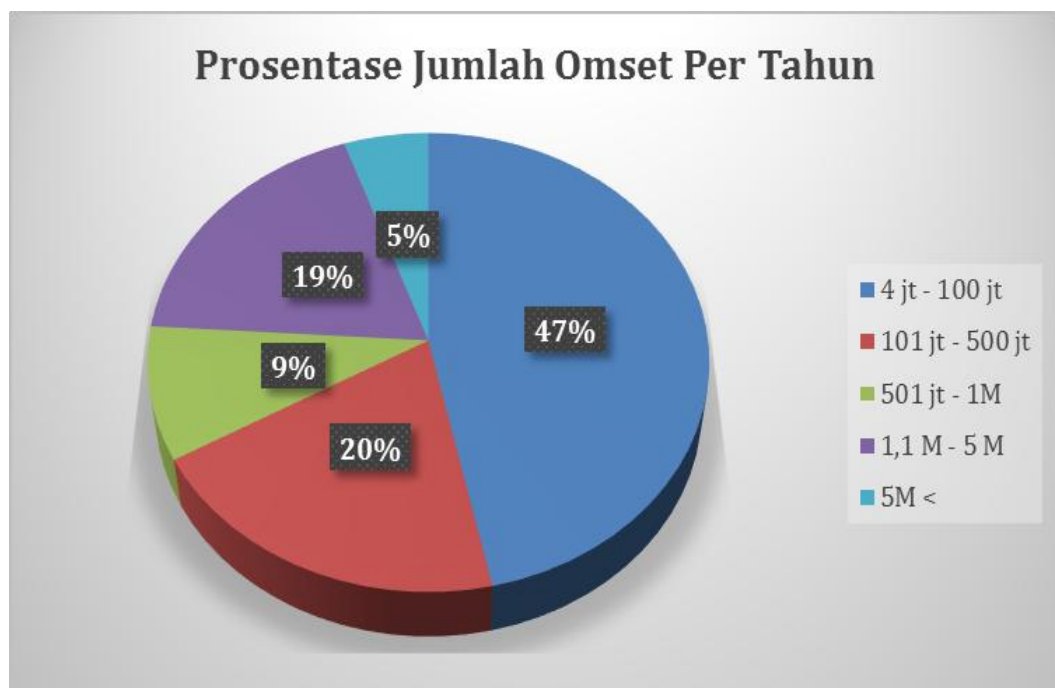
UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu antara 1 juta – 50 juta (60%), kemudian 101 juta – 500 juta sebanyak 17% dan antara 51 juta – 100 juta sebanyak 10% , antara 500 juta – 1 Milyar sebanyak 9 % sisanya sebanyak 4% lebih dari I Milyar

Gambar 5.3
Jumlah Investasi



UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah Investasiterbanyak yaitu antara 4 juta – 100 juta (49%), kemudian 101 juta – 500 juta sebanyak 38% dan antara 501 juta – 1 Milyar sebanyak 6% , antara 1,1 Milyar – 5 Milyar sebanyak 4% sisanya sebanyak 4% lebih dari 5 Milyar

Gambar 5.4
Jumlah Omset Per Tahun



UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah Omset pertahun terbanyak yaitu antara 4 juta – 100 juta (47%), kemudian antara 101 juta – 500 juta sebanyak 20% dan antara 1,1 Milyar – 5 Milyar sebanyak 19%, 501 juta – 1 Milyar sebanyak 9% , antara 1,1 Milyar – 5 Milyar sebanyak 4% sisanya sebanyak 5% lebih dari 5 Milyar

B. Kontribusi UMKM terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Kota Surakarta jumlah UMKM Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 7409 Unit UMKM dengan sebaran UMKM dengan rincian 275 merupakan usaha menengah, 960 usaha kecil, serta 164 usaha kreatif dan 6010 usaha non formal. Dari data tersebut diperinci kembali menurut sector yang digunakan untuk analisis kontribusi terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data PDRB Kota Surakarta 2020 adalah 47.644.563.660.000 dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang.

C. Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Tabel 5.1
Kontribusi UMKM terhadap PDRB

No	Sektor	Jumlah UMKM	Pendapatan / tahun	Persentase kontribusi terhadap PDRB
1	UMKM TPT	110	317.572.875.000	0,66 %
2	UMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya	41	85.130.808.708	0,18 %
3	UMKM Logam	32	41.852.500.000	0,088 %
4	UMKM Industri Mesin	16	12.953.200.000	0,027 %
5	UMKM Elektronik dan Telematika	18	8.292.000.000	0,017 %
6	UMKM Kuliner	116	7.822.000.000	0,016 %
7	UMKM Percetakan	33	5.378.050.000	0,011 %
8	UMKM Aneka Industri	15	5.016.156.825	0,010 %

Sumber: Data diolah 2021

Penjelasan:

1. Data UMKM TPT di Kota Surakarta saat ini ada 110 UMKM, dari 110 UMKM tersebut total dari pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 317.572.875.000, sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM TPT Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.66 % dari nilai PDRB total Kota Surakarta.
2. Data UMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya di Kota Surakarta saat ini ada 41 UMKM, dari 41 UMKM tersebut total dari pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 85.130.808.708, sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM TPT Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.18 % dari nilai PDRB total Kota Surakarta.
3. Data UMKM Logam di Kota Surakarta saat ini ada 32 UMKM, dari 32 UMKM tersebut total dari pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 41.852.500.000 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Logam Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.088 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta.
4. Data UMKM Industri Mesin di Kota Surakarta saat ini ada 16 UMKM, dari 16 UMKM tersebut total pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 12.953.200.000 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Logam Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.027 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta.

5. Data UMKM Elektronik dan Telematika di Kota Surakarta saat ini ada 18 UMKM, dari 18 UMKM tersebut total pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 8.292.000.000 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Logam Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.017 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta.
6. Data UMKM Kuliner di Kota Surakarta saat ini ada 116 UMKM, dari 116 UMKM tersebut total pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 7.822.000.000 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Kuliner Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.016 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta.
7. Data UMKM Percetakan di Kota Surakarta saat ini ada 33 UMKM, dari 33 UMKM tersebut total pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 5.378.050.000 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Percetakan Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.011 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta
8. Data UMKM Aneka Industri di Kota Surakarta saat ini ada 15 UMKM, dari 15 UMKM tersebut total pendapatan per tahun adalah sebesar Rp 5.016.156.825 ,sedangkan PDRB Kota Surakarta sebesar Rp 47.644.563.660.000, sehingga seluruh UMKM Aneka Industri Kota Surakarta memberikan kontribusi pada PDRB Kota Surakarta sebesar 0.010 % dari nilai total PDRB Kota Surakarta.

D. Kontribusi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 5.2
Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

No	Sektor	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
1	UMKM TPT	110	2929	1,1 %
2	UMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya	41	784	0,29 %
3	UMKM Logam	32	287	0,10 %
4	UMKM Industri Mesin	16	609	0,22 %
5	UMKM Elektronik dan Telematika	18	65	0,02 %
6	UMKM Kuliner	116	899	0,33 %
7	UMKM Percetakan	33	629	0,23 %
8	UMKM Aneka Industri	15	115	0,04 %

Sumber: Data diolah 2021

1. Data UMKM TPT di Kota Surakarta saat ini ada 110 UMKM, dari 110 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 2929 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke

Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang, sehingga seluruh UMKM TPT Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 1,1 % dari total Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.

2. Data UMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya di Kota Surakarta saat ini ada 41 UMKM, dari 41 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 784 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang, sehingga seluruh UMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,29% dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.
3. Data UMKM Logam di Kota Surakarta saat ini ada 32 UMKM, dari 32 UMKM tersebut total dari dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 287 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang, sehingga seluruh UMKM Logam Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,10 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.
4. Data UMKM Industri Mesin di Kota Surakarta saat ini ada 16 UMKM, dari 16 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 609 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082

orang, sehingga seluruh UMKM Industri Mesin Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,22 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.

5. Data UMKM Elektronik dan Telematika di Kota Surakarta saat ini ada 18 UMKM, dari 18 UMKM tersebut dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 65 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang, sehingga seluruh UMKM Elektronik dan Telematika Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,02 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.
6. Data UMKM Kuliner di Kota Surakarta saat ini ada 116 UMKM, dari 116 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 899 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang, sehingga seluruh UMKM Kuliner Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,33 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.
7. Data UMKM Percetakan di Kota Surakarta saat ini ada 33 UMKM, dari 33 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 629 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082, sehingga seluruh UMKM Percetakan Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar

0,23 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.

8. Data UMKM Aneka Industri di Kota Surakarta saat ini ada 15 UMKM, dari 15 UMKM tersebut total dari penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 115 orang, sedangkan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082, sehingga seluruh UMKM Aneka Industri Kota Surakarta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja Kota Surakarta sebesar 0,04 % dari Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta.

E. Kontribusi UMKM Terhadap Penyerapan Ekspor

Tabel 5.3
Data Ekspor Berdasarkan Komoditas Tahun 2020

No	Komoditas	Nilai Ekspor (Rupiah)
1.	Batik	157.890.001.514
2.	Biskuit	645.609.490
3.	Cerutu	5.895.362.000
4.	Gula Kelapa	1.412.662.148
5.	Kantong Plastik	77.862.734.242
6.	Kartu Ucapan	67.361.891
7.	Tekstil dan Produk Tekstil	-
8.	Kerajinan Rotan	2.204.882.441
9.	Mebel Kayu	37.183.267.044
10.	Mebel rotan	10.446.190.685
11.	Mesin	21.495.000

12.	Peralatan Kantor	283.702.904
13.	Perabotan Kayu	6.312.003.597
14.	Perangkat RT dari Kayu	-
15.	Mie Instant	365.271.700
16.	Produk Olahan	3.366.535.436
17.	TPT	169.455.972.074
Total Ekspor		473.413.052.165

Sumber: Data diolah 2021

Realisasi ekspor berdasarkan komoditas di Kota Surakarta pada tahun 2020 dengan nilai ekspor tertinggi adalah komoditas TPT (Rp 169.455.972.074), batik(Rp 157.890.001.514), kantong plastik (Rp77.862.734.242)dan mebel kayu (Rp 37.183.267.044).

F. Strategi Peningkatan Kontribusi UMKM Terhadap PDRB, Ketenagakerjaan dan Ekspor

Aspek	Strategi	Program	Kegiatan	Kebijakan
Data Base UKM dan IKM	Membangun aplikasi Data Base UMKM	Aplikasi Data base bagi pelaku UMKM	Pemetaan dan Identifikasi UMKM	Date base UMKM yang terintegrasi di Solo Destination
			Pendataan UMKM yang telah melakukan dan berpotensi ekspor	
	Data Base realisasi ekspor	Aplikasi data base realisi Espor	Update data secara berkala realisasi ekspor	Data Base UMKM dan realisasi ekspor
Peningkatan Kapasitas UMKM	Peningkatan kecakapan pengelolaan usaha	Peningkatan pemanfaatan inkubator bisnis untuk pengembanganUMKM	Pemanfaatan teknologi untuk pengembangan UMKM	Kebutuhan pelatihan dan kebutuhan teknologi untuk pengembangan UMKM
		Penyelenggaraan Pelatihan secara bertahap dan berjenjang	Pelatihan secara bertahap dimulai dengan pelatihan dasar sampai dengan peningkatan daya saing	Program layanan teknologi dan Konsultasi Bisnisdimanfaatkan oleh UMKMuntuk pengembangan bisnis

Aspek	Strategi	Program	Kegiatan	Kebijakan
		Pelatihan dan sertifikasi keahlian pelaku Usaha UMKM	Pelatihan yang terstandarisasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan UMKM	Penyediaan Tenaga Pelatihan yang memiliki kecakapan kompetensi sesuai dengan kebutuhan UMKM
	Menjamin kesiapan sarana dan prasarana pelatihan	Peningkatan dukungan peralatan dan pendanaan bagi proses pelatihan	Mempersiapkan peralatan dan teknologi yang dibutuhkan	Ketersediaan peralatan teknologi dan pendanaan pendukung pelatihan
		Peningkatan kesiapan tenaga pelatih sesuai dengan kompetensi	Kopetensi pelatih sesuai fokus bidang pelatihan	Seleksi Kompetensi pelatih yang sesuai dengan jenis pelatihan
Keberlanjutan	Standarisasi dan Sertifikasi produk	Peningkatan kualitas produk	Pelatihan manajemen perijinan dan sertifikasi produk	Pendampingan standarisasi produk sampai dengan perijinan terpenuhi
	Dukungan bagi IKM dan UKM dalam	Peningkatan pengetahuan tentang Dokumen Ekspor	Pelatihan manajemen Dokumen Ekspor bagi	Gedung Sentra IKM Fasilitas Terpadu

Aspek	Strategi	Program	Kegiatan	Kebijakan
	pemasaran/ekspor	bagi UMKM	pelaku UMKM	pelatihan dan <i>coaching clinic</i>
	Pendampingan Marketing Online	Peningkatan Manajemen usaha dan perencanaan bisnis	Pelatihan Manajemen usaha dan pengembangan usaha	Pendampingan manajemen usaha dari dinas terkait
	Fasilitasi akses pada permodalan dan pendanaan	Peningkatan manajemen usaha sehingga layak mendapat pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan	Pelatihan manajemen keuangan pengelolaan modal kerja	Bantuan modal usaha bagi usahawan muda dan bisnis yang kreatif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data BPS Kota Surakarta jumlah UMKM Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 7409 Unit UMKM dengan sebaran UMKM dengan rincian 275 merupakan usaha menengah, 960 usaha kecil, serta 164 usaha kreatif dan 6010 usaha non formal
2. Data PDRB Kota Surakarta 2020 adalah 47.644.563.660.000 dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Kota Surakarta sebesar 266.082 orang
3. UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak antara 5-9 orang dan 1- 4 orang
4. Modal kerja terbanyak UMKM di Kota Surakarta adalah 1 juta sampai dengan 50 juta dan 101 juta sampai dengan 500 juta Rupiah
5. UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah Investasiterbanyak yaitu antara 4 juta sanpa dengan 100 juta dan 101 juta sampai dengan 500 juta Rupiah
6. UMKM di Kota Surakarta memiliki jumlah Omset pertahunterbanyak yaitu antara 4 juta sampai dengan 100 juta kemudianantara 101 juta sampai dengan 500 juta
7. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Surakarta tertinggi adalah subsector UMKMTPT danUMKM furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya serta subsector Logam

8. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta tertinggi adalah subsector TPT dan furniture dan barang dari kayu, rotan dan sebagainya
9. Kontribusi UMKM terhadap ekspor terbesar adalah komoditas TPT dan Batik

B. Rekomendasi Kebijakan

1. Peningkatan pengembangan UMKM melalui Sentra/klaster industri.
2. Pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan UMKM
3. Penyederhanaan perijinan bagi UMKM dan insentif bagi UMKM kreatif
4. Memprioritaskan dan memberikan insentif bagi pengembangan UMKM lokal sehingga mampu bersaing dengan UMKM asing
5. Pemanfaatan sentra UMKM menjadi pusat pengembangan UMKM dan pusat pelatihan bagi pelaku UMKM.
6. Mendirikan pusat pelayanan HAKI, Hak Paten, merek dagang.
7. Pelatihan pengembangan produk inovatif bagi UMKM unggulan dan industry kreatif
8. Pelatihan pemasaran melalui media online bagi UMKM
9. Pelatihan dan pendampingan pengurusan dokumen ekspor
10. Memfasilitasi pendirian *market place* lokal bagi produk – produk kreatif Kota Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abisuga-Oyekunle, O. A., Patra, S. K., & Muchie, M. (2020). SMEs in sustainable development: Their role in poverty reduction and employment generation in sub-Saharan Africa. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 12*(4), 405-419.
- Amoah, S. K., & Amoah, A. K. (2018). The role of small and medium enterprises (SMEs) to Employment in Ghana. *International Journal of Business and Economics Research, 7*(5), 151-157.
- Awoyemi, B. O., & Makanju, A. A. (2020). The Growth Prospect and Challenges of Financing Micro, Small and Medium Scale Enterprises (MSMEs) in Nigeria. *European Journal of Business and Management Research, 5*(4).
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2021). *Surakarta dalam Angka 2021*. Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Caliskan, A., & Esmer, S. (2019). Does it really worth investing in relationship marketing for a port business?. *Case Studies on Transport Policy, 7*(2), 375-383.
- Descotes, R. M., & Walliser, B. (2018). International marketing related competences and SMEs' export performance during the recession. *Projectics/Proy ctica/Projectique, (3)*, 61-82.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. (2020). *Sebaran Sektor UMKM Kota Surakarta*. Surakarta: Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta.
- Falk, M., & de Lemos, F. F. (2019). Complementarity of R&D and productivity in SME export behavior. *Journal of Business Research, 96*, 157-168.
- Gupta, H., & Barua, M. K. (2018). A novel hybrid multi-criteria method for supplier selection among SMEs on the basis of innovation ability. *International Journal of Logistics Research and Applications, 21*(3), 201-223.
- Jena, N. R., Thatte, L. R., & Ket, V. G. (2018). Performance of the micro, small and medium enterprises (MSMEs) manufacturing sector in select states in

- India: The concept of MSME Manufacturing Business Facilitator (MSME-MBF) Index. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(1), 1-22.
- Jenkins, H., & Hossain, M. (2017). An analysis of the macroeconomic conditions required for SME lending: *Evidence from Turkey and other emerging market countries*. *Panoeconomicus*, 64(1), 77-92.
- Jung, H., Hwang, J., & Kim, B. K. (2018). Does R&D investment increase SME survival during a recession?. *Technological Forecasting and Social Change*, 137, 190-198.
- Kumar, P. (2019). Financial Inclusion and Micro and Small Enterprises Growth. *International Journal of Engineering and Management Research e-ISSN*, 2250-0758.
- Kottika, E., Özsoy, A., Rydén, P., Theodorakis, I. G., Kaminakis, K., Kottikas, K. G., & Stathakopoulos, V. (2020). We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis. *Industrial Marketing Management*, 88, 352-365.
- Muliadi, M., Darma, D. C., & Kasuma, J. (2020). MSMEs as mediation in the effects of investment credit, interest rates, and labor on economic growth: Evidence from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 9(2), 01-12.
- Ostrovskaya, V. N., Tyurina, Y. G., Konina, O. V., Przhedetskaya, N. V., Pupynina, E. G., & Natsubidze, A. S. (2017). Perspectives of elimination of "institutional gaps" in foreign economic activities of subjects of SME within the global crisis management. In *Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management* (pp. 213-218). Springer, Cham.
- Padawangi, R. (2019). Progressive City Surakarta? Learning from Community-Based Initiatives in Urban Indonesia. In *The Rise of Progressive Cities East and West* (pp. 233-249). Springer, Singapore.

- Prijadi, R., & Desiana, P. M. (2017). Factors Affecting the Profitability and Growth of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *International Journal of Economics & Management*, 11.
- Sarimuda, R.B. (2014). Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran terbuka di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun. *Jurnal Ekonomi Bisnis TahunXXIV*, No. 02, 1-14.
- Sathish, A., & Rajamohan, S. (2018). Contribution of msme in Indian economy. *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 8(12), 90-97.
- Singh, A. (2021). Contribution Of Msme To Employment Generation Through Varoious Sector-A Case Study Of Uttar Pradesh. *Elementary Education Online*, 20(5), 1904-1917.
- Sholahuddin, M., & Wahyuddin, M. (2019, October). The Influence of" Islam Nusantara" on Batik Style in Surakarta, Central Java. In 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) (pp. 233-235). Atlantis Press.
- Stouraitis, V., Mior Harun, M. H., & Kyritsis, M. (2017). Motivators of SME initial export choice and the European Union regional effect in manufacturing. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 23(1), 35-55.
- Van Scheers, L. (2018). Strategies of global recession for small business enterprises in emerging markets: Case of South Africa. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Woźniak, M., Duda, J., Gąsior, A., & Bernat, T. (2019). Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland. *Procedia Computer Science*, 159, 2470-2480.

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)
KOTA SURAKARTA**